

Judul : Biaya Haji Tahun 2024 Diusulkan Naik
Tanggal : Kamis, 16 November 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Biaya Haji Tahun 2024 Diusulkan Naik

Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji rata-rata Rp 105 juta. Usulan masih dibahas Panitia Kerja DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 H/2024 M rata-rata sebesar Rp 105 juta. Usulan BPIH ini masih akan dibahas Panitia Kerja Komisi VIII DPR dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Nanti, calon jemaah haji tidak membayar sepenuhnya BPIH. Mengacu rata-rata BPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26, calon jemaah membayar rata-rata Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dan sisanya dari sumber lain.

Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan BPIH ini disampaikan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta pada 13 November 2023.

Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, antara lain biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzma), pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan biaya hidup.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (15/11/2023), Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bah-

wa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 44 UU tersebut menyebutkan, BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah (bipih), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Jadi, bipih yang harus dibayar calon jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kemenag mengusulkan sebesar Rp 105 juta, bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar oleh calon jemaah," kata Wibowo.

Panja BPIH Tahun 1445 H/2024 M masih membahas usulan awal BPIH dari Kemenag. Setiap komponen biaya akan dibahas dan dicek harganya ke lapangan. Nantinya akan dihasilkan BPIH versi hasil pembahasan dan kesepakatan Panja yang kemudian dibawa kembali pada Rapat Kerja Komisi VIII dan Kemenag untuk disepakati sebagai BPIH 2024.

Biaya haji yang disepakati pemerintah dan DPR tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui peraturan presiden. "Di regulasi tersebut ditetapkan berapa biaya haji yang dibayar calon jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat sesuai kesepakatan peme-

rintah dan DPR," paparnya.

Wibowo mencontohkan, saat penetapan BPIH 1444 H/2023 M, pemerintah mengusulkan BPIH 1444 H rata-rata sebesar Rp 98.893.909,11. Kemenag dan Komisi VIII lalu membentuk Panja BPIH untuk membahasnya. Panja BPIH juga meninjau harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Dalam rapat kerja pada 15 Februari 2023, akhirnya disepakati BPIH 1444 H/2023 M rata-rata sebesar Rp 90.050.637,26, dengan asumsi kurs 1 dollar AS senilai Rp 15.150 dan 1 riyal Arab Saudi senilai Rp 4.040.

Disepakati juga bahwa bipih yang dibayar calon jemaah pada 2023 rata-rata sebesar Rp 49.812.700,26 (55,3 persen dari BPIH). Adapun BPIH yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp 40.237.937 (44,7 persen).

Secara terpisah, Yaquut mengatakan, ada yang berbeda dalam skema pengusulan biaya haji 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah hanya mengusulkan besaran BPIH, tidak lagi menghitung komposisi besaran Bipih yang akan dibayar calon jemaah dan nilai manfaat.

Usulan lebih tinggi

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan,

usulan BPIH 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR lebih tinggi dibandingkan dengan biaya haji 2023. Sejumlah faktor yang menyebabkannya, antara lain, kenaikan kurs, baik dollar AS maupun riyal, dan penambahan layanan.

"Kalau kita cek, nilai tukar kurs dollar AS terhadap rupiah per hari ini sudah di angka Rp 15.700-an. Nah, dalam usulan BPIH kita gunakan asumsi Rp 16.000 karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif. Ini yang dalam skema panja akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa?" tuturnya.

Selisih kurs ini, kata Hilman, berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena adanya kenaikan kurs.

"Misalnya, transportasi bus selawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus selawat tahun ini sama dengan tahun 2023, sebesar 146 riyal Arab Saudi. Namun, asumsi nilai kursnya berbeda sehingga ada kenaikan dalam usulan," kata Hilman.

Kedua, layanan yang harganya memang naik dibandingkan tahun lalu. Kenaikan usulan terjadi karena kenaikan harga

dan selisih kurs. Contohnya, akomodasi di Madinah dan Mekkah. "Pada 2023, sewa hotel di Madinah rata-rata 1.373 riyal Arab Saudi, tahun ini kita usulkan 1.454 riyal Arab Saudi. Demikian juga di Mekkah, ada kenaikan usulan dari tahun sebelumnya," ujar Hilman.

Ketiga, layanan yang harganya naik dan volumenya bertambah. Kenaikan usulan terjadi karena selisih harga, selisih volume, dan selisih kurs. Contohnya, konsumsi di Mekkah, yang tahun lalu disepakati dengan Komisi VIII hanya 44 kali makan, pada akhirnya bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan.

"Tahun ini kami usulkan layanan konsumsi di Mekkah menjadi 84 kali makan dengan rincian tiga kali makan selama 28 hari sehingga ada selisih volume. Harga konsumsi per satu kali makan pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini juga naik. Kenaikan bertambah seiring adanya perbedaan kurs," tutur Hilman.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia Syam Refiadi mengatakan, memang tak bisa diingkari kalau kenaikan itu akibat adanya komponen-komponen paket yang juga ikut naik. "Ada kenaikan wajar. Tinggal realisasinya saja seperti apa yang tidak memberatkan jemaah haji reguler," ujarnya. (EIN)